

DISERTASI

MODEL KEBIJAKAN MITIGASI RESIKO BANJIR BERBASIS KOLABORASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor Ilmu Lingkungan**



**ZAILANI SURYA MARPAUNG
NIM. 20013682227006**

**PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

**MODEL KEBIJAKAN MITIGASI RISIKO BANJIR BERBASIS
KOLABORASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KOTA PALEMBANG**

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar Doktor Ilmu Lingkungan

Oleh :

ZAILANI SURYA MARPAUNG

20013682227006

Palembang, 30 Juli 2025

Promotor

Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM.
NIP.195811191985031003

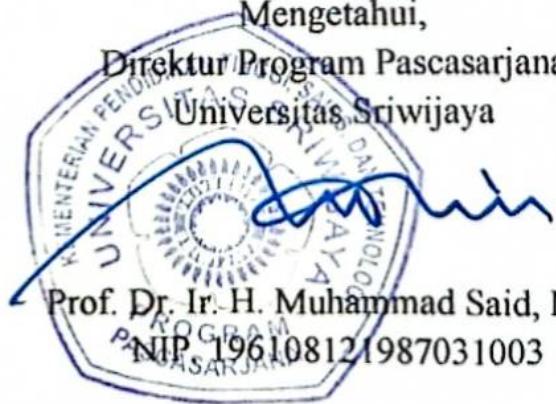
Co-Promotor I

Dr. Yoyok Hendarso, MA
NIP. 196006251985031005

Co-Promotor II

Dr. Ir. Satria Jaya Piatna, M.S
NIP. 196401151989031002

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc
NIP. 196108121987031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Karya tulis ilmiah berupa Disertasi ini dengan judul “Model Kebijakan Mitigasi Risiko Banjir Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang” telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Karya Tulis Ilmiah Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada tanggal 30 Juli 2025.

Palembang, 30 Juli 2025

Tim Pengaji Karya Tulis berupa Disertasi

Ketua

1. Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM.
NIP. 195811191985031003

()

Anggota

2. Dr. Yoyok Hendarso, MA.
NIP. 196006251985031005

()

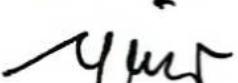
3. Dr. Ir. Satria Jaya Priatna, M.S.
NIP. 196401151989031002

()

4. Dr. Ir. Muhammad Yamin, M.P.
NIP. 196609031993031001

()

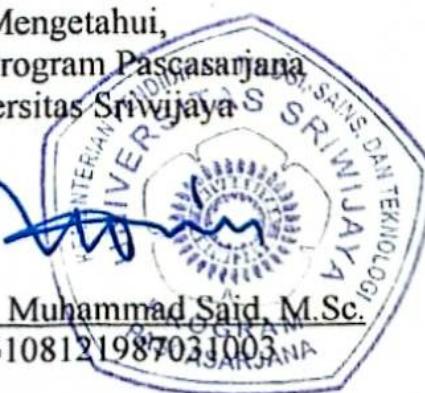
5. Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197506032000032001

()

6. Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si.
NIP. 198009082005011001

()

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.
NIP. 196108121987031003

PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Zailani Surya Marpaung
NIM : 20013682227006
Program Studi : S3 Ilmu Lingkungan
BKU : Sosiologi Lingkungan
Judul Disertasi : Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi
Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang

Menyatakan bahwa Disertasi saya merupakan hasil karya sendiri didampingi Tim Promotor dan Co Promotor dan bukan hasil penjiplakan / plagiat. Apabila ditemukan unsur penjiplakan / plagiat Kecuali sumber rujukan yang diacu dan menjadi referensi dalam disertasi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Palembang 4 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Zailani Surya Marpaung

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh..

Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang".

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Doktor di Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M. Sc. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si. Selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya 2021-2025
3. Alm. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. Selaku Promotor
4. Prof.Dr.Slamet Widodo,MS.,MM Selaku Promotor
5. Dr. Yoyok Hendarso, M.A Selaku Co-Promotor
6. Dr. Ir. Satria Jaya Priatna, M.S Selaku Co-Promotor
7. Prof.Dr.Dwiyanto Indiahono,S.Sos.,M.Si Selaku Pengaji Tamu
8. Dr. Ir.Muhammad Yamin, M.P Selaku Pengaji
9. Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si Selaku Pengaji
10. Ibu Merza Agmalinda, SP Selaku tenaga kependidikan Program Studi S3 Ilmu Lingkungan yang telah memfasilitasi proses administrasi di Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya
11. Para Dosen Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya yang selama ini dengan tulus dan ikhlas memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berguna bagi penulis.

Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung sampai selesainya penulisan proposal penelitian ini. Semoga Allah SWT membala segala amal baik saudara.

Penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 Juli 2025



Zailani Surya Marpaung

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kebaharuan Penelitian (Novelty).....	16
1.6 Batasan Penelitian.....	20
1.7 Hipotesis Penelitian	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Banjir Kota Palembang	22
2.2 Konsep Kebijakan Publik	27
2.3 Konsep Mitigasi Resiko.....	44
2.4 Konsep <i>Collaborative Governance</i>	47
2.5 Konsep Partisipasi.....	56
2.6 Konsep Kebijakan Kolaboratif	61
2.7 Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik	63
2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu	66
2.9 Kerangka Pikir	101

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....

3.1 Metode Penelitian	102
3.2 Sifat Penelitian	102
3.3 Tipe Penelitian	102
3.4 Pendekatan Penelitian	103
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian.....	103
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian.....	103
3.7 Variabel Penelitian	105
3.8 Definisi Operasional Variabel	107
3.9 Teknik Pengumpulan data	116
3.10 Instrumen Penelitian	116
3.11 Uji Validitas dan Reliabilitas	117
3.12 Analisis Korelasi dan Uji Hipotesis	118
3.13 Pengujian Statistik Deskriptif	119
3.14 Pengujian Hipotesis Penelitian	120
3.15 Tahapan Penelitian.....	123
3.14 Teknik Analisis Data	124
3.14.1 Analisis Kuantitatif.....	124
3.14.2 Analisis Kualitatif.....	127

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	128
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	128
4.1.1 Gambaran Umum Kota Palembang	119
4.1.2 Kondisi Geografis	130
4.1.3 Kondisi Geologi.....	131
4.1.4 Kondisi Penggunaan Lahan	132
4.1.5 Batas Administrasi.....	133
4.1.6 Kependudukan	134
4.1.7 Komoditi dan Potensi Daerah	135
4.1.8 Perekonomian	139
4.1.9 Kondisi Umum Sistem Transportasi.....	141
4.2 Data dan Deskripsi Sarana Prasarana Terkait Permasalahan Banjir.....	144
4.2.1 Kondisi Sungai.....	144
4.2.2 Kondisi Stasiun Pengamat Muka Air Sungai.....	146
4.2.3 Level Air Maksimum	147
4.2.4 Sistem Pengendalian Banjir	148
4.2.5 Perbaikan dan Normalisasi Sungai	149
4.3 Kondisi dan Analisis Permasalahan Sistem Drainase di Kota Palembang	150
4.3.1 Kondisi DAS dan Prasarana Drainase.....	150
4.3.2 Kesimpulan Kondisi Sistem Drainase di Kota Palembang.....	174
4.4 Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir yang sudah dibuat oleh Pemko Palembang	176
4.4.1 Peraturan Walikota Palembang No.55 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai	176
4.4.2 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa	177
4.4.3 Peraturan Daerah Kota Palembang No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	179
4.4.4 Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2018 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.....	181
4.5 Hasil dan Pembahasan Analisis Kuantitatif.....	183
4.5.1 Karakteristik Responden.....	183
4.5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	184
4.5.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	185
4.5.4 Model Regresi Linear Berganda	186
4.5.5 Pengujian Hipotesis Secara Parsial	189
4.5.6 Pengujian Hipotesis Secara Simultan	189
4.5.7 Koefisien Determinasi	190
4.5.8 Hasil Analisis SEM-PLS	191
4.5.9 <i>Structural Model Assessment</i>	195
4.4.10Pengujian Hipotesis	196
4.6 Hasil dan Pembahasan Analisis Kualitatif.....	199
4.6.1 Analisis Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir	199
4.6.2 Kesimpulan dan Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir	210
4.6.3 Proses Kolaborasi dalam Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir di Kota Palembang.....	221
4.6.4 Kendala Proses Kolaborasi dalam Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir di Kota Palembang	224
4.6.5 Kolaborasi Kelembagaan Berpengaruh Dalam Mitigasi Resiko Banjir	

Di Kota Palembang	226
4.6.6 Aspek Partisipasi Masyarakat	228
4.6.7 Kendala Proses Partisipasi masyarakat dalam Mitigasi Resiko Banjir di Kota Palembang.....	231
4.6.8 Partisipasi Masyarakat berpengaruh dalam Mitigasi Resiko Banjir di Kota Palembang	233
4.6.9 Kesimpulan dan Model Proses Kolaborasi dalam Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir di Kota Palembang	236
4.6.10Model Eksisting Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang	238
4.6.11Model Rekomendasi Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang	241
4.7 Diskusi	234
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	248
5.1 Kesimpulan	248
5.2 Saran	250
DAFTAR PUSTAKA.....	253
LAMPIRAN-LAMPIRAN	270

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak dirusak, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang *anthroposentrism*, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksplorasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia (Azra, 2010). Kondisi lingkungan mengalami perubahan baik secara cepat maupun perlahan-lahan, oleh berbagai faktor penyebab, dan beragam dampaknya. Perubahan pada salah satu atau lebih dari komponen lingkungan akan mempengaruhi komponen lainnya dari lingkungan tersebut dengan intensitas yang berbeda. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah, misalnya, akan berpengaruh positif maupun negatif terhadap komponen lingkungan dari daerah tersebut seperti lahan, air, flora dan fauna, dll. Pertumbuhan penduduk memerlukan pangan, tempat tinggal, air bersih, dan lain lain yang dapat dipenuhi oleh lingkungan. Perubahan guna lahan akan berpengaruh pada komponen lain termasuk sumberdaya air dan tanah. Kerusakan lingkungan alam tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Terbukti, bahwa sebagian besar bencana-bencana yang terjadi bukanlah karena faktor alam semata, tetapi karena ulah dan perilaku manusia sendiri. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup tidak terlepas dari peran manusia sebagai penguasa lingkungan di bumi ini. Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yakni permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup (Soegianto, 2012). Batasan lingkungan hidup dalam hal ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya, lalu definisi dari Emil Salim dalam (Danusaputra, 2005), lingkungan hidup adalah

segala benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Salah satu permasalahan lingkungan serius yang melanda beberapa daerah perkotaan di Indonesia adalah banjir. Banjir bukanlah murni karena faktor alam semata, namun juga karena faktor manusia yang antara lain disebabkan tidak terkendalinya perubahan pemanfaatan lahan serta mengindahkan kelestarian daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir. Banjir adalah kondisi saat air meluap dari saluran air atau sungai dan membanjiri daratan yang seharusnya tidak tergenang air. Banjir dapat terjadi karena faktor alam misalnya terjadi karena curah hujan yang tinggi, meluapnya air atau bendungan, atau karena faktor lain seperti meluapnya air laut akibat badai atau tsunami. Banjir dapat terjadi di daerah perkotaan atau pedesaan dan memiliki dampak yang merugikan, termasuk kerusakan pada bangunan, hilangnya tanaman atau ternak, dan bahkan kehilangan nyawa. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan terjadinya longsor, dan penyebaran penyakit yang terkait dengan air (Seno, 2013).

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih memiliki permasalahan terkait banjir yang selalu melanda setiap tahun. Permasalahan banjir yang menggenangi kawasan perkotaan tersebut sangatlah mengganggu aksesibilitas dan pergerakan perekonomian masyarakat. Kota Palembang yang merupakan daerah perkotaan, sebagian besar daerahnya rawa atau dataran rendah serta memiliki intensitas curah hujan 40 mm/tahun. Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa ada 20 kota rawan banjir di Indonesia, salah satunya yaitu Kota Palembang. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang diketahui bahwa beberapa lokasi daerah di Daerah Aliran Sungai masuk kedalam 66 titik prioritas penanganan banjir di kota Palembang. Perubahan lahan sebanyak 25,74% sepanjang tahun 2000-2020 telah menyebabkan beberapa daerah di Daerah Aliran Sungai mengalami banjir. Pada tahun 2020, terdapat 38 titik lokasi banjir di Daerah Aliran Sungai akibat reklamasi rawa dan pengurangan ruang terbuka hijau. Menurut Hoirisky dkk (2018), pada tahun 2020 ketinggian banjir di daerah aliran sungai berkisar antara 20-70 cm dengan durasi banjir selama 2-8 jam. Setiap musim hujan terjadi hampir sebagian ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut tergenang air, terutama pada jalan-jalan protokol serta pemukiman. Banjir dan genangan air pada sejumlah titik Palembang masih terus terjadi. contohnya, banjir di daerah Bendungan Simpang Polda yang menjadi langganan genangan air saat turun hujan dengan intensitas tinggi dan di beberapa lokasi lain.

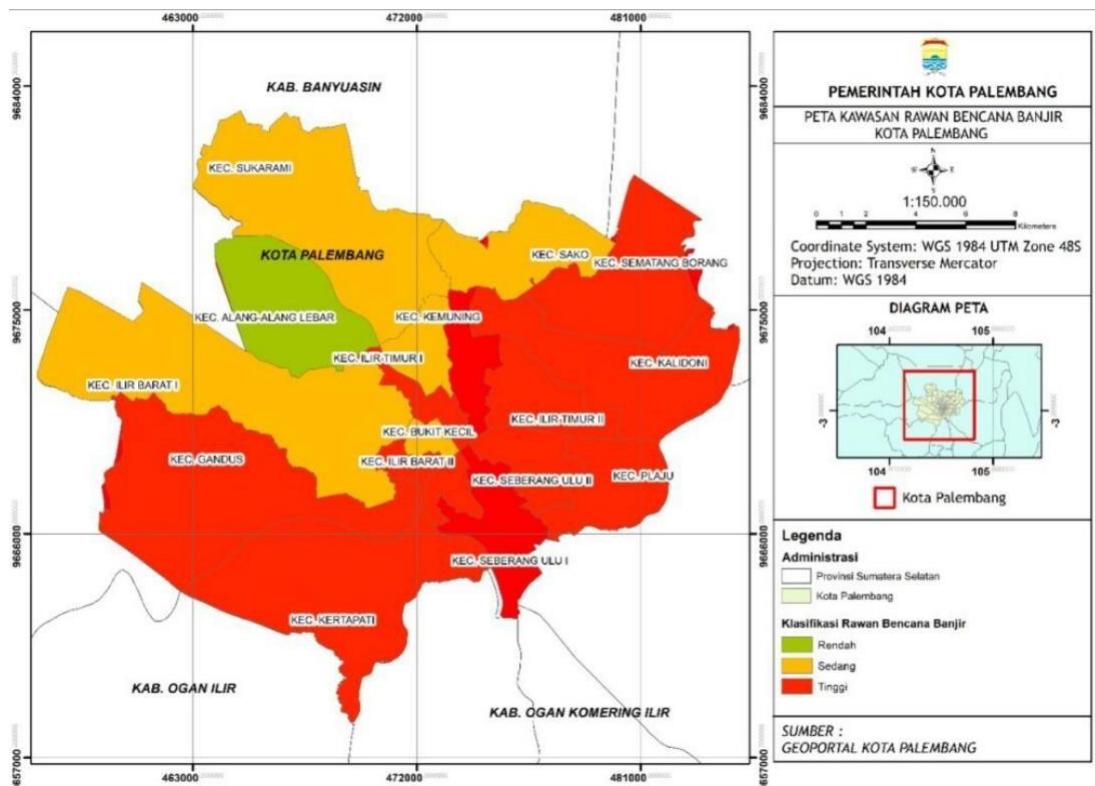
Berikut lokasi genangan air/banjir yang terjadi di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Palembang.

Tabel 1. Lokasi Genangan Air/ Banjir dengan Ketinggian 20-70 cm

No	Lokasi Genangan Air	Kecamatan
1.	Jl. Soekarno-Hatta	Alang-Alang Lebar
2.	Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II	Alang-Alang Lebar/Sukarami
3.	Jl. Kapt. A. Rivai	Ilir Timur I
4.	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara	Gandus
5.	Jl. Prameswara	Ilir Barat I
6.	Jl. Angkatan 45	Ilir Barat I
7.	Jl. Demang Lebar Daun	Ilir Barat I
8.	Jl. Sultan Muh. Mansyur	Ilir Barat I
9.	Jl. Puncak Sekuning	Ilir Barat I
10.	Jl. Macan Kumbang-Jl. Kancil Putih	Ilir Barat I
11.	Jl. Jendral Sudirman	Ilir Timur I/Kemuning
12.	Jl. Gub. H. Bastari	Seberang Ulu I
13.	Jl. A. Yani	Seberang Ulu II
14.	Jl. Kh. Wahid Hasyim	Seberang Ulu I
15.	Jl. Ki Merogan	Kertapati
16.	Jl. R. Sukamto	Ilir Timur II/Kemuning
17.	Jl. Sentosa	Plaju
18.	Jl. Ryacudu	Seberang Ulu I
19.	Jl. Veteran	Ilir Timur I
20.	Jl. Mayor Ruslan	Ilir Timur II

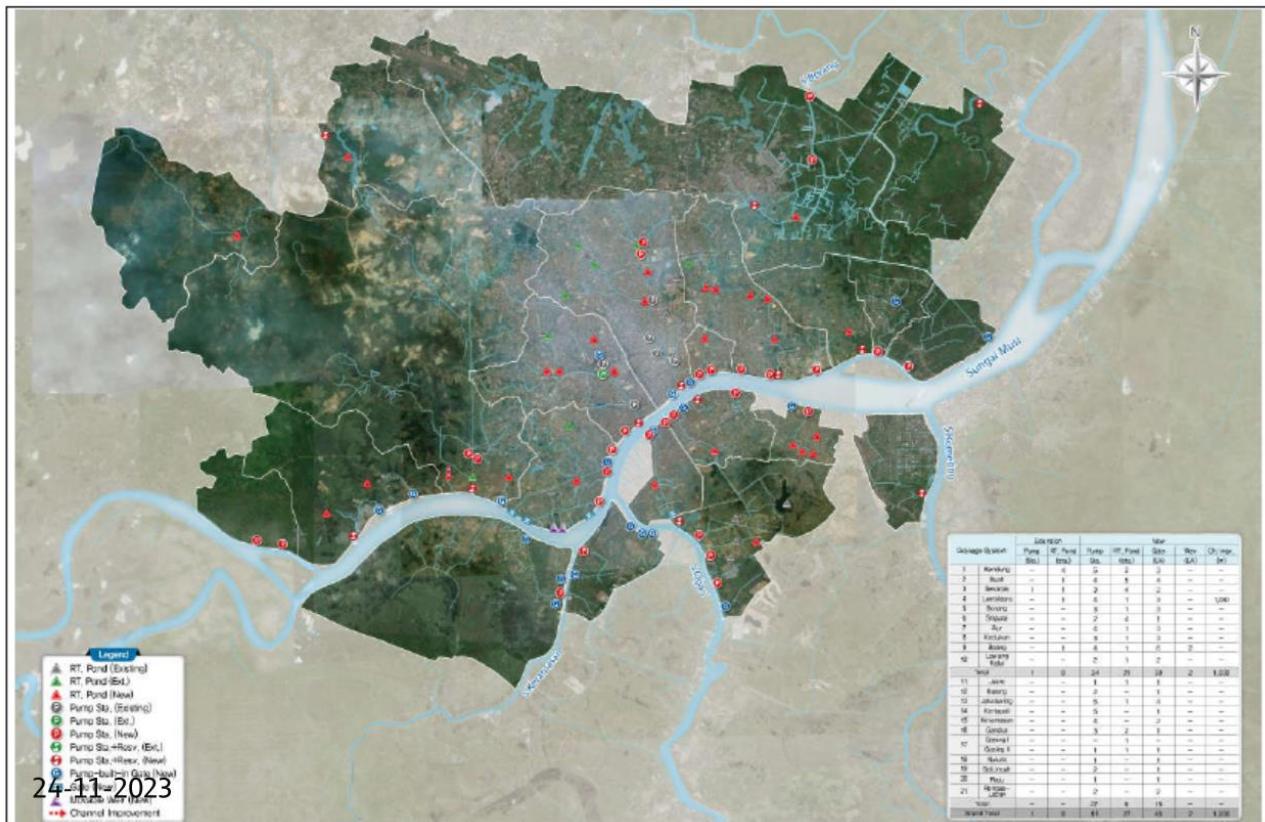
Sumber Satu Data Palembang 2023

Gambar 1. Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Palembang



Sumber Satu Data Palembang 2023

Berdasarkan observasi awal peneliti ketika mencoba mengkonfirmasi peta rawan banjir yang didapat dari sumber satu data Kota Palembang dengan kenyataan banjir yang diamati melalui aplikasi Avenza Maps pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada hari jumat 24 November 2023 didapatkan data bahwa lebih dari separuh wilayah Kota Palembang terendam air. Sehingga memang terdapat kecocokan data dengan Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Palembang.



Gambar 2. Peta Real Wilayah Terdampak Banjir dari Aplikasi Avenza Map

Pengelolaan tata ruang perkotaan yang serampangan, penggunaan areal serapan air yang masif buat pemukiman, sampai perambahan hutan pada kawasan hulu sungai ditengarai menjadi penyebab melemahnya daya dukung lingkungan saat terjadinya hujan deras. Sejumlah tempat terendam air, mulai dari pusat kota sampai area pemukiman warga. Tak tanggung tanggung ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Walaupun setiap tahun dilakukan penambahan kolam retensi, terutama pada lokasi yang rawan banjir. Tetapi, keberadaan kurang lebih 42 kolam retensi di Kota Palembang itu pula relatif tak membantu bila hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Bukan hanya kolam retensi, eksistensi pompa air yang memakai sistem pompanisasi pun kurang membantu pada waktu cuaca ekstrem itu melanda. Muka air Sungai Musi telah di atas muka air pada daratan Kota Palembang. Kolam retensi yang telah dibangun Pemerintah Kota belum dapat menampung seluruh

volume debit limpasan dan mengakibatkan luapan air ke pemukiman masyarakat. Salah satu penyebab tidak tertampungnya limpasan karena kapasitas kolam retensi eksisting yang tidak sesuai, sebagai contoh seperti yang terjadi pada kolam retensi Siti Khodijah (Al Amin. 2016). Begitu juga dengan kelayakan sarana dan prasarana kolam retensi lain yang belum memadai. Penyebab lain semakin meluasnya areal banjir di Kota Palembang akibat ketidak selaras dari pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam sehingga munculnya kerusakan lingkungan, seperti perilaku masyarakat yang membuang sampah di area sungai. Kemudian banyak sekali kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, misalnya areal resapan air dibangun mall dan hotel berbintang seperti yang terjadi pada kebijakan Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan (*Build, Operate and Transfer / BOT*) Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi gedung pusat perbelanjaan, hotel bintang 4, dilokasi Mall Palembang Icon. Melihat dari kondisi permasalahan yang terjadi maka dibutuhkan suatu upaya pengendalian banjir. Selain hal tersebut diatas beberapa penyebab utama banjir di Kota Palembang antara lain:

1. Topografi Kota Palembang

Kota Palembang terletak di sebelah timur pulau Sumatera, secara umum areanya rendah dan memiliki ketinggian di atas permukaan laut antara 0~20 m. 50% dari keseluruhan daerahnya merupakan dataran yang tidak tergenang air, 15% tanah tergenang secara musiman dan 35% tanah tergenang terus menerus sepanjang musim. Terdapat perbedaan karakter topografi kota Palembang antara Seberang Ulu yang berbatasan dengan sungai Musi dan Seberang Ilir di sebelah utara. Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi lebih rendah daripada muka air maksimum sungai Musi kecuali lahan-lahan yang telah dan akan dibangun di mana merupakan daerah reklamasi. Sebaliknya wilayah Seberang Ilir memiliki karakter lebih tinggi daripada permukaan laut sekitar 4-20m dan adanya lembah kontinyu namun tidak terjal. Rendahnya dataran kota secara geografis dan terletak di pinggiran sungai yang relatif memiliki dataran yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Kota Palembang posisinya lebih rendah dari permukaan laut, sehingga pasang-surut sungai akan mempengaruhi daerah ini yang membuatnya mudah terendam banjir. Begitupun secara geomorfologi Palembang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 m dari permukaan laut, yang sebagian besar terdiri dari rawa dan sungai. Kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir dibagi oleh sungai Musi yang dipengaruhi pasang surut sekitar 3-5 meter. Hal ini juga berarti *drainage based* dari saluran atau sungai di kota sangat dipengaruhi oleh pasang surut di sungai Musi (Alia, 2018).

2. Curah Hujan

Kota Palembang termasuk daerah hutan hujan tropis karena mendapat pengaruh secara geografis yang letaknya berdekatan dengan garis ekuator, namun sama dengan sebagian besar wilayah Indonesia lainnya tampak adanya musim penghujan dan musim kemarau. Dikarenakan tidak memiliki perbedaan antara musim dingin dan musim panas yang cerah dan lembab dengan suhu tinggi tahunan, Palembang memiliki karakteristik perbedaan suhu tahunan lebih kecil daripada perbedaan suhu harian dan sering turunnya hujan deras lokal. Sering turun *Squall* (hujan badai yang mendadak) di antara waktu siang dan malam, suhu rata-rata tahunannya adalah sekitar 27°C dan curah hujan tahunan rata-rata adalah lebih dari atau sama dengan 2,500mm. Curah Hujan Tinggi Daerah perkotaan biasanya memiliki curah hujan yang tinggi disebabkan karena panasnya daerah perkotaan yang mendorong peningkatan curah hujan dalam jumlah dan intensitas yang cukup besar. Namun sebaliknya daerah serapan air semakin menyusut karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya kota semakin rawan dengan bencana banjir. Kota Palembang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² atau 40.061 Ha. Kota Palembang diapit oleh 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Ilir. Berdasarkan luasannya, Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%) (Badan Pusat Statistik, 2023). Rata-rata curah hujan selama tahun 2023 berkisar antara 77,9 mm³ (September) sampai 452,80 mm³ (Maret). Palembang mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2023 rata-rata berkisar antara 84,80% (Agustus) sampai 90,96% (November). Menurut BMKG Klas I Sumsel, perkiraan musim hujan dengan intensitas lebat puncak musim hujan akan terjadi pada Februari – Maret. Diperkirakan, di Palembang curah hujan akan tinggi di angka 200 sampai 400 mm³ (mililiter) pada Februari – Maret. Secara angka curah hujan ini lebih tinggi dibandingkan dengan DKI yang berada di angka 120,20 mm³. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.768 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Pada 5 Oktober 2022 curah hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Palembang, membuat hampir semua sudut kota mengalami banjir. Hal ini ditimbulkan karena meluapnya sungai Musi. Ruas titik banjir tersebut berada pada kawasan jalan R. Soekamto, sekip bendung serta seduduk putih. pada lokasi tersebut air mengenangi jalan kurang lebih 20 cm, sebagai akibatnya banyak kendaraan

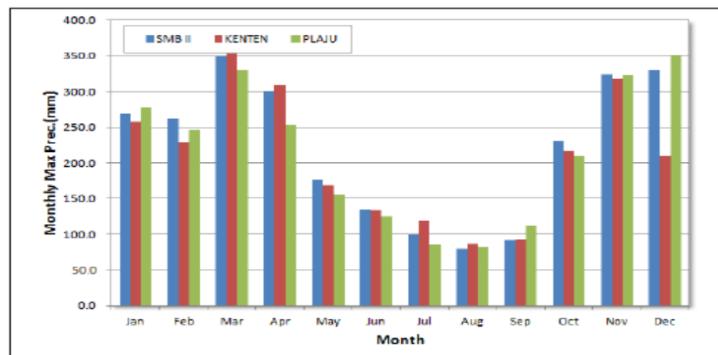
yang sangat ekstra waspada saat akan melewati kawasan tersebut. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, curah hujan yang tinggi pada waktu itu merupakan kejadian langka yang dialami selama 30 tahun terakhir. berdasarkan catatan mereka, curah hujan ekstrem terakhir kali terjadi pada 6 Oktober 1980 lalu. Akibat banjir ini selain jalanan macet parah, sejumlah sekolah juga terpaksa harus meliburkan siswanya atau memberikan toleransi datang telat, sebab jalan macet parah diakibatkan banjir. Di antara bencana itu, ada kategori hidrometeorologi, dan geologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Bencana ini terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi seperti angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Banjir terjadi pada interval yang tidak teratur serta bervariasi dalam ukuran, durasi dan area yang terkena dampaknya. Air secara alami selalu mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Artinya di dataran rendah dapat terjadi banjir lebih cepat sebelum mencapai tempat yang lebih tinggi. Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Namun bisa pula terjadi selama berhari-hari bahkan lebih lama (Putri, 2020). Di Palembang terdapat stasiun pengamat curah hujan seperti SMB II, Kenten dan Plaju yang dapat dipercaya dalam hal data statistik melalui penjaminan data bertahun-tahun, dan data curah hujan stasiun-stasiun ini diperiksa. Dari Hasil pemeriksaan 3 stasiun terhadap curah hujan 25 tahun terakhir (tahun 1998~2023), diketahui bahwa curah hujan tahunan rata-rata adalah 2,568.2 mm, curah hujan bulanan rata-rata adalah 348.2 mm dengan curah hujan terbanyak pada bulan Maret dan tersedikit pada bulan Agustus dengan 82.8 mm. Kemudian diketahui bahwa pada bulan Juni~September yang merupakan musim kemarau, secara relatif curah hujannya sedikit yaitu sekitar 16% dari curah hujan tahunan, sedangkan musim lainnya hujan turun secara berkelanjutan.

Tabel 2. Curah Hujan

Klasifikasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
SMBII	268.1	262.5	349.2	301.1	176.8	134.9	99.3	80.0	91.8	229.8	323.8	330.9	2,648.2
KENTEN	257.5	229.4	364.7	309.2	168.4	133.5	119.5	87.1	92.8	216.5	317.8	208.8	2,505.2
PLAJU	277.8	246.2	330.6	253.4	156.2	124.9	85.4	81.4	111.8	208.8	322.7	352.1	2,551.2
Mean	267.8	246.0	348.2	287.9	167.2	131.1	101.4	82.8	98.8	218.4	321.4	297.3	2,568.2

Sumber : Data BMKG 2023

Gambar 3. Grafik Curah Hujan



Sumber : Data BMKG 2023

3. Kondisi Sistem Drainase

Di kota Palembang mengalir sungai Musi yang mendapatkan pengaruh pasang surut dan membelah kota dari barat ke timur, sebagian besar air larian yang muncul dari DAS dibuang ke sungai Musi atau anak sungai Musi. Dikarenakan kenaikan pasang sungai Musi, jika muka airnya naik maka aliran akan berbalik aliran ke sub DAS sehingga muka air dalam saluran drainasenya naik, jika saat ini terjadi hujan deras lokal maka akan terjadi bencana banjir disebabkan drainase dalam DAS yang buruk. Walaupun kota Palembang sering dilanda banjir karena secara topografi sekitar 35% daerahnya merupakan dataran rendah yang lebih rendah dari ketinggian muka air maksimum sungai Musi, dataran rendah yang bukan daerah pembangunan menjadi daerah resapan air alami sehingga membawa elemen positif dalam mengurangi beban banjir di hilir. Namun, dikarenakan urbanisasi yang signifikan, dibangunnya perumahan, daerah perbisnisan, daerah industri dll di dataran rendah yang ada, membuat berkurangnya daerah resapan air, dan menyebabkan kondisi meningkatkan kemungkinan banjir akibat naiknya muka air saluran dan limpasan (Alia, F, Al Amin, M. B et al. 2019).

Gambar 4. Air Saluran dan Limpasan



Sumber : Dinas PUPR Kota Palembang 2023

Awalnya kota Palembang dibagi atas 19 daerah drainase, akhir-akhir ini bisa dibagi menjadi 21 daerah drainase dengan membagi Gasing dan Rengas-Lacak, lalu Sriguna dan Plaju. 21 daerah drainase kota Palembang adalah Bendung, Kedukan, Keramasan, Buah, Boang, Gandus, Sekanak, Lawang Kidul, Gasing, Lambidaro, Juaro, Nyiur, Borang, Batang, Sei Lincah, Sriguna, Jakabaring, Plaju, Aur, Kertapati, Rengas-Lacak. Batas masing-masing daerah drainase ditentukan lagi melalui peta GIS, berdasarkan peta daerah drainase yang sudah ada. Diketahui bahwa dari 21 daerah drainase, daerah Lambidaro adalah yang paling besar yaitu 64.5 dan Lawang Kidul km^2 adalah yang paling kecil yaitu 1.7 km^2 , (Al Amin, M. B. 2016).

dan masing-masing luas area daerah drainase adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Daerah Drainase

Daerah Drainase	Luas Area(km^2)	Daerah Drainase	Luas Area(km^2)	Daerah Drainase	Luas Area(km^2)
Bendung	19.5	Kedukan	4.0	Keramasan	25.9
Buah	12.1	Boang	8.3	Gandus	14.5
Sekanak	11.9	Lawang Kidul	1.7	Gasing I, II	32.6
Lambidaro	64.5	Juaro	6.1	Nyiur	13.1
Borang	58.2	Batang	4.3	Sei Lincah	5.1
Sriguna	3.0	Jakabaring	12.4	Plaju	6.0
Aur	5.3	Kertapati	5.5	Rengas-Lacak	6.1

Sumber : Dinas PUPR Kota Palembang 2023

4. Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Di Sungai

Sampah adalah salah satu penyebab utama banjir di kota. Sampah yang dihasilkan kota Palembang adalah sekitar 1.200-1.400 ton per hari. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya tempat yang layak untuk menampung sampah warga, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Ketidakperdulian masyarakat akan sampah, salah satunya adalah ditemukan pada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang umumnya menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang terlalu banyak dapat menumpuk dan menghambat aliran sungai menuju laut. Selain itu Penumpukan sampah sungai juga dapat mendangkalkan sungai, akibatnya jika curah hujan tinggi sungai yang dangkal dapat meluap sehingga menyebabkan banjir. Berdasarkan hasil Observasi langsung di lapangan pada saluran drainase yang terdapat di Kecamatan Plaju menunjukkan beberapa permasalahan sebagai faktor penyebab banjir, antara lain: Penumpukan sampah pada saluran drainase, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terutama sampah yang kian menumpuk mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase yang ada, tidak berfungsinya saluran drainase, Rusaknya struktur pada saluran drainase dapat mempersempit dimensi saluran, bebatuan pada dinding yang rusak juga akan menumpuk di dalam saluran. Banyaknya endapan atau sedimentasi di dalam saluran drainase menyebabkan saluran drainase tak lagi berfungsi untuk mengalirkan air sehingga air akan tergenang di permukaan jalan.

Gambar 5. Perilaku masyarakat membuang sampah dan material ke aliran sungai



Sumber : Dokumentasi Dinas PUPR

5. Perilaku Masyarakat Mendirikan Bangunan dan Membuang Material Bangunan Ke Saluran Air.

Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan disaluran air serta membuang material hasil bangunan kesaluran air. Pada kawasan pemukiman di Kelurahan Bukit Lama tempat tinggal atau bangunan yang terbangun di sepanjang sungai mengambil bagian bantaran sungai oleh karena itu terjadinya penyempitan alur sungai dan daya tampung deras aliran air yang semakin berkurang, sehingga setiap terjadinya curah hujan tinggi air meluap menggenangi pemukiman. Dengan berkembangnya bantaran sungai sebagai kawasan pemukiman berdampak turunnya nilai fungsi sungai sebagai *retarding pond*, ancaman banjir, dan dapat menurunkan kualitas lingkungan sekitar kawasan pemukiman. Permasalahan lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir di pemukiman, Sebagai Contoh daerah Bukit Lama adalah akibat dari dampak perilaku manusia dalam mendirikan bangunan. Terdapat banyak masyarakat yang menimbulkan daerah saluran air dengan mendirikan bangunan, hal ini dapat menyebabkan tidak mampunya daya resapan menampung air dalam jumlah yang besar sehingga air akan meluap melebihi batas normal. Disamping itu dengan adanya sampah disekitar warga juga menyebabkan dapat timbulnya bau disekitar pemukiman dan timbulnya penyakit. Sampah juga menyumbat aliran drainase disekitar pemukiman yang menyebabkan tersumbatnya aliran air. Hal ini terjadi dikarenakan faktor tata ruang yang kurang baik, minimnya tempat pembuangan yang tetap dan dekat dengan pemukiman juga kurangnya kesadaran akan kebersihan membuang sampah dibawah rumah nya dan di rawa-rawa. Bencana banjir yang terjadi di pemukiman seperti yang berada di Jalan Darmapala Lorong Bukit Permata Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut tidak hanya permasalahan dari luar saja, melainkan dari faktor dalam yakni faktor dari masyarakat pemukiman sendiri. Kurangnya kesadaran dan tidak pedulinya masyarakat dalam pentingnya mencegah banjir yang masih terbilang minim. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya banjir yang semakin sering di musim penghujan. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang kurang terpadu dan tidak terarah di daerah Bukit Lama cenderung mengalami degradasi lingkungan menyebabkan kawasan menjadi pemukiman kumuh dan hal tersebut juga akan berdampak langsung akan permasalahan bencana lingkungan salah satunya bencana banjir. Terdapat beberapa penyebab masalah dalam terjadinya banjir pada pemukiman di Bukit Lama seperti terbatasnya akses untuk mendapat hunian yang memadai telah menyebabkan masyarakat untuk tinggal di sempadan sungai sebagai tempat bermukim yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota Palembang dan juga dampak perilaku manusia dalam menjaga lingkungan. Terdapat banyak sampah yang menggenangi di sekitar perumahan warga dan masalah sampah dan sedimentasi tersebut yang

merupakan salah satu faktor utama dalam penyebab terjadinya banjir. Penataan pembangunan kota yang mengabaikan keseimbangan alam, taman dan hutan buatan bahkan daerah resapan air diubah menjadi bangunan, jalan bahkan perumahan yang berakibat daerah resapan air yang tersisa tidak lagi mampu menampung air hujan, air inilah yang akan tumpah menggenangi jalan, perumahan dan tempat umum

Gambar 6. Perilaku Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Saluran Air



5. Faktor Kebijakan yang tidak Konsisten

Beberapa peraturan perundungan ataupun regulasi baik ditingkat pusat amupun daerah yang terkait dengan pengendalian banjir sudah banyak dibuat, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Wilayah Sungai.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
13. Peraturan Walikota Palembang No. 55 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai.

14. Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2018 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pemanfaatan Rawa.

Sebagai contoh Misalnya dibuatnya Peraturan daerah Kota Palembang No 11 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pemanfaatan Rawa harapannya Pemerintah kota Palembang bisa mengendalikan pemanfatan lahan rawa. Karena Pemerintah kota Palembang, berdasarkan dengan pasal 4 dan 5 Peraturan daerah No. 11 tahun 2012 berwenang melakukan pengendalian penggunaan lahan rawa supaya tak mudah dan cepat terjadi perubahan fungsinya sebagai wilayah penyangga air yang telah diatur pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa wilayah di Kota Palembang yang seharusnya menjadi kawasan rawa, malah ditimbun buat kepentingan perumahan, pertokoan, dan sebagainya. Akibat penimbunan rawa tersebut mengurangi jumlah anak sungai yang berfungsi sebagai saluran drainase, dari 280 anak sungai kini hanya tersisa sekitar 60 anak sungai. Kondisi inilah yang mengakibatkan air hujan tak bisa mengalir dengan sempurna ke Sungai Musi. Karenanya, kota Palembang terus dilanda banjir, baik dari hujan maupun pasang surutnya Sungai Musi. Kemudian Permasalahan Banjir Dikota Palembang adalah bahwa selama ini disinyalir kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait isu lingkungan tidak melalui proses perumusan dan mekanisme yang baik serta tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga dampak dari kebijakan tersebut justru mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Ketika banjir besar melanda Kota Palembang pada akhir 2021 lalu dan menimbulkan kerugian yang sangat massif bagi masyarakat, mengakibatkan pemerintah Kota Palembang digugat oleh masyarakat terdampak banjir dan aliansi masyarakat yang tergabung dalam WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan ternyata untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia gugatan tersebut dimenangkan dan dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Dalam keputusan gugatan tersebut, Pemerintah Kota Palembang dianggap lalai dalam mencegah sekaligus mengendalikan banjir serta telah melanggar Perda nomor 15 tahun 2012 mengenai RTRW kota. Akibatnya 4.000 warga Palembang terdampak menjadi korban banjir. Keputusan gugatan itu juga mewajibkan Pemerintah harus segera menyediakan atau menghentikan alih fungsi rawa, menyediakan rawa konservasi hingga pengendalian dengan menyediakan kolam retensi yang memadai dan melakukan pengelolaan sampah di setiap kelurahan.

Kemudian Menurunnya fungsi sungai di Kota Palembang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2011 tentang pengelolaan sungai yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan

dengan tujuan untuk kemanfaatan sungai yang berkelanjutan. Pengelolaan sungai yang terdiri atas konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak sungai dilakukan dengan melibatkan instansi teknis, swasta termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sungai. Salah satu pendekatan yang ditempuh pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam mereduksi permasalahan banjir adalah dengan menjalin kemitraan dengan membentuk Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir sejak 2017. Beberapa komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir tersebut adalah

Tabel 4. Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir di Kota Palembang

No	Nama Komunitas Peduli Banjir/Komunitas Peduli Sungai
1.	KMPB Tanjung Sari
2.	KMPB Sapta Marga
3.	KMPB Kedamaian
4.	KMPS dan KMPB Bukit Baru I
5.	KMPS dan KMPB Tanjung Rawo
6.	KMPS dan KMPB Perumahan Bukit Sejahtera
7.	KMPB dan KMPS Sungai Hitam
8.	KMPB dan KMPS Sungai Lambidaro RT 56
9.	KMPB dan KMPS Sungai Sekanak
10.	KMPB dan KMPS Hulubalang
11.	KMPB Anggada
12.	KMPS Sekanak Hulu
13.	KMPB dan KMPS 9 Ilir
14.	KMPB Kepandean Baru
15.	KMPB 2 Ilir
16.	KMPB dan KMPS Kuto Batu
17.	KMPB 5 Ilir
18.	KMPB dan KMPS Sei Pangeran
19.	KMPB Perumahan Citra Damai 2
20.	KMPB 20 Ilir D 4
21.	KMPS dan PB 5 Ulu RT 36
22.	KMPB dan PB 22 Ilir Jeramba Karang
23.	KMPB dan PB 2 Ilir RT 35 Yayasan 2
24.	KMPS dan PB Silaberanti RT 30
25.	KMPS dan PB Sako RW 36
26.	KMPB Pertahanan
27.	KMPB Sosial
28.	KMPB Kijang Mas
29.	KMPB Pasundan Yuka
30.	KMPB Sentosa

Namun walaupun sudah ada komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir di Kota Palembang permasalahan banjir belum juga tereduksi dengan baik.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan perlu dilakukan sebuah Analisis komprehensif Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di

Kota Palembang yang akan direalisasikan dalam Disertasi berjudul “Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang” penelitian ini diharapkan menghasilkan rumusan, rekomendasi atau Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan berbagai identifikasi masalah yang diuraikan diatas Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Kondisi Geomorfologi dan Curah Hujan Tinggi

Kota Palembang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata hanya sekitar 8 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini didominasi oleh kawasan rawa dan aliran sungai yang sangat rentan mengalami luapan, khususnya saat musim hujan tiba. Curah hujan yang tinggi pada periode-periode tertentu semakin meningkatkan potensi terjadinya banjir. Berdasarkan data nasional, Kota Palembang termasuk dalam 20 kota dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi di Indonesia.

2. Sistem Drainase yang Buruk

Infrastruktur drainase di Kota Palembang belum memadai untuk mengalirkan air hujan secara efektif. Kondisi ini menyebabkan banyaknya genangan air yang kemudian berkembang menjadi banjir, terutama di kawasan permukiman padat dan daerah rendah.

3. Perilaku Masyarakat yang Merusak Lingkungan

Perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan saluran air menghambat aliran air dan mempercepat terjadinya sumbatan. Selain itu, pendirian bangunan liar di sepanjang bantaran sungai serta pembuangan material bangunan ke dalam saluran air turut memperburuk kondisi sistem drainase.

4. Kebijakan Lingkungan yang Tidak Konsisten

Implementasi kebijakan lingkungan oleh pemerintah daerah masih belum konsisten, baik dari segi perencanaan, pengawasan, maupun penegakan aturan. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan juga menjadi persoalan, diperparah oleh terjadinya alih fungsi lahan sebesar 25,74% sepanjang tahun 2000–2020, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yang berdampak langsung pada meningkatnya kejadian banjir.

5. Kurangnya Kolaborasi Kelembagaan

Koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam upaya penanggulangan banjir masih tergolong lemah. Tidak

adanya sinergi yang kuat menyebabkan pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan kurang efektif.

6. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi banjir masih sangat terbatas. Masyarakat belum diberikan ruang yang cukup dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program penanggulangan banjir yang berbasis lokal.

Dan pertanyaan penelitian yang ingin dikaji adalah bagaimana Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang? serta bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dan kolaborasi kelembagaan dalam mitigasi resiko banjir di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kerangka Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir di Kota Palembang

Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada terkait mitigasi banjir, termasuk instrumen hukum. Mengkaji efektivitas kebijakan dalam mengurangi risiko banjir, mengelola drainase perkotaan, dan melindungi daerah resapan air.

2. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Banjir:

Menganalisis tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam program-program mitigasi banjir, Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi aktif masyarakat, seperti akses informasi, dan sumber daya, Mengevaluasi dampak partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi resiko banjir.

3. Mengidentifikasi dan Menganalisis Bentuk Kolaborasi Kelembagaan.

Memetakan jaringan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dalam mitigasi banjir, Menganalisis efektivitas koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antar lembaga dalam mencapai tujuan mitigasi banjir dan Mengidentifikasi kendala dan peluang dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif.

4. Merumuskan Model Kebijakan Mitigasi Risiko Banjir Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat:

Memetakan jaringan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dalam mitigasi banjir, Menganalisis efektivitas koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antar lembaga dalam mencapai tujuan mitigasi banjir dan Mengidentifikasi kendala dan peluang dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung penanganan masalah lingkungan dikota besar seperti banjir.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu lingkungan, sosiologi lingkungan dan kebijakan publik.
3. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah banjir.
4. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
5. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu sosiologi lingkungan dan ilmu lingkungan, yaitu kebijakan, partisipasi masyarakat dan salah satu permasalahan lingkungan yaitu banjir.

Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
2. Manfaat praktis bagi akademisi, yaitu diharapkan adanya hasil penelitian bisa menjadi bahan rujukan dan *literature review* terhadap kajian banjir.
3. Manfaat praktis bagi masyarakat, yaitu diharapkan adanya hasil penelitian bisa menjadi masukan yang berharga terkait permasalahan banjir di kota Palembang.
4. Manfaat praktis bagi pemerintah diharapkan dapat akan memberikan masukan pada pemerintah selaku pembuat kebijakan agar memperhatikan persoalan lingkungan.
5. Manfaat praktis bagi mahasiswa, yaitu sebagai pedoman dan literatur terkait persoalan lingkungan.

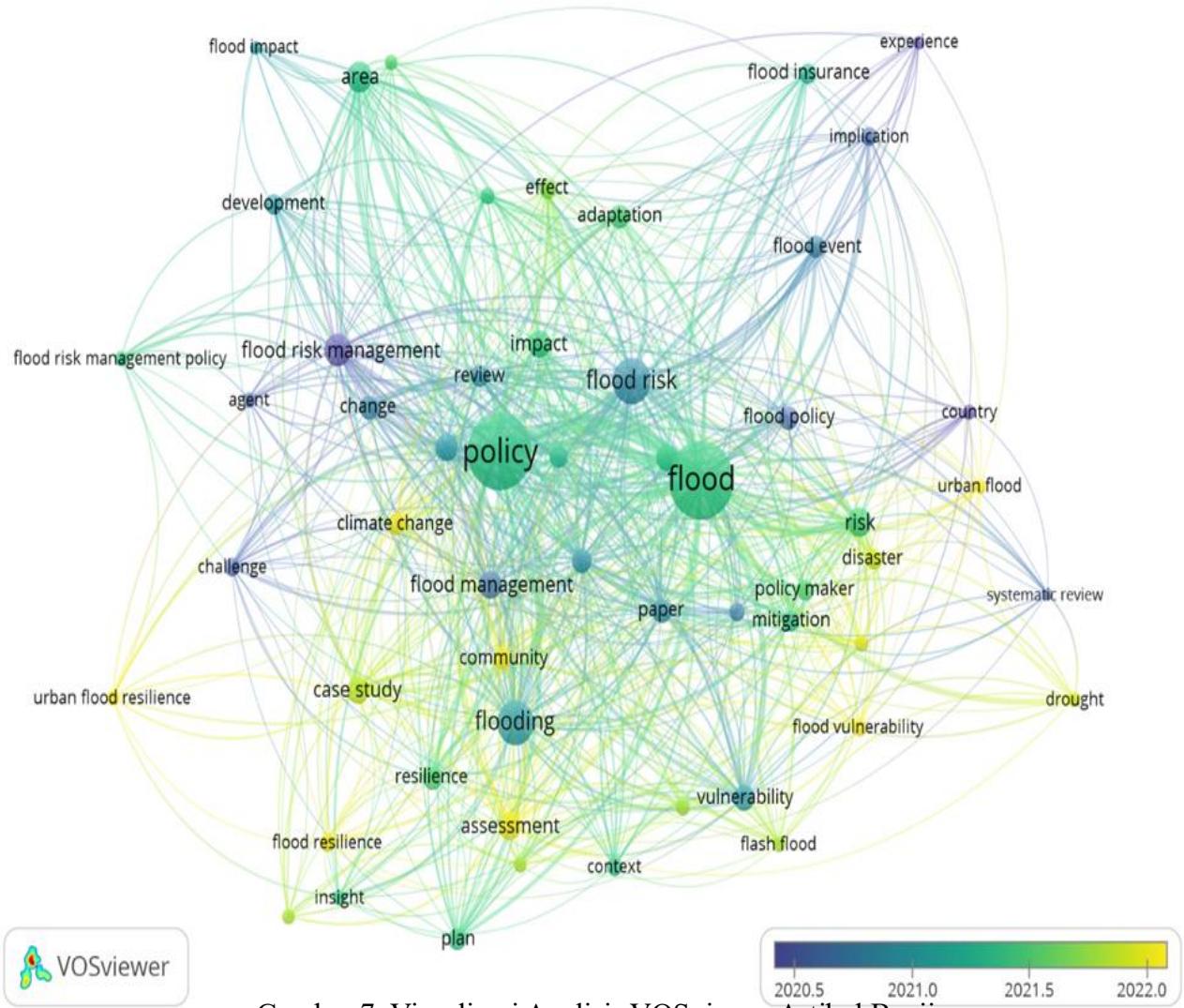
1.5. Kebaharuan Penelitian (Novelty)

Kebaharuan Penelitian (Novelty) pada dasarnya merupakan unsur originalitas. Suatu temuan yang bersifat baru. Artinya menemukan apa yang belum di temukan orang lain. Menemukan celah pengetahuan baru, masalah baru dan metode baru dari sekian banyak riset yang telah dilakukan. Novelty di temukan ketika kita mencoba menjelajahi fenomena dari permasalahan penelitian. Dapat saja sebuah penelitian di katakan memiliki novelty walaupun mempunyai variabel penelitian yang sama tetapi dengan lingkungan yang berbeda.

Kajian-kajian ilmiah terkait kebijakan banjir mengalami perkembangan signifikan dalam tujuh tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam hasil pemetaan visual bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap 300 artikel internasional bertema banjir yang terbit antara tahun 2018 hingga 2025. Hasil visualisasi menunjukkan jejaring kata kunci yang kompleks dan terbagi ke dalam

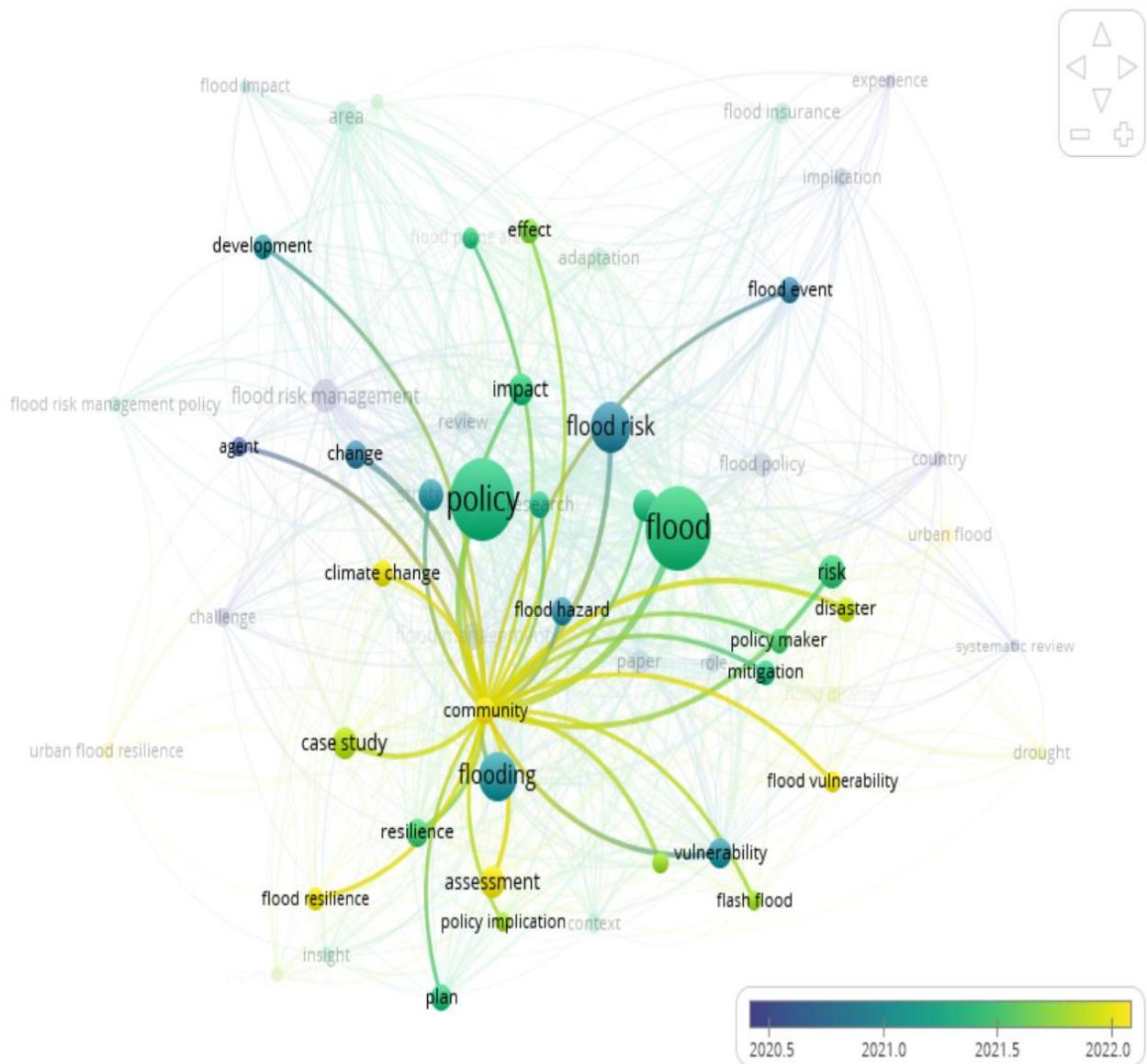
beberapa klaster utama. Klaster pertama yang ditandai dengan warna hijau menunjukkan dominasi kata kunci seperti *flood*, *flood risk*, dan *policy*, yang menandakan bahwa pendekatan dominan dalam studi kebijakan banjir masih berfokus pada manajemen risiko banjir secara teknokratis. Klaster kedua, yang berwarna merah, menyoroti tema-tema seperti *policy*, *flood risk management*, dan *development*, yang menunjukkan bahwa riset juga cukup intensif membahas integrasi kebijakan dengan pengelolaan kawasan rawan banjir serta perencanaan pembangunan berbasis risiko. Klaster ketiga, berwarna biru, menampilkan kata kunci seperti *resilience*, *flooding*, dan *assessment*, yang mengindikasikan adanya pendekatan evaluatif terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan fokus pada konsep ketahanan terhadap banjir. Sementara itu, klaster keempat dan kelima, yang masing-masing berwarna kuning dan ungu, menampilkan tema-tema seperti *flood insurance*, *adaptation*, *vulnerability*, dan *community*. Walaupun menyentuh aspek sosial dan partisipatif, klaster ini tampak berada di pinggiran jejaring utama, menandakan bahwa isu partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas aktor belum menjadi pusat perhatian dalam wacana global kebijakan banjir.

Kondisi ini membuka ruang kebaruan bagi penelitian berjudul "*Model Kebijakan Mitigasi Risiko Banjir Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat*". Penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum terjamah secara substansial dalam literatur internasional, yakni kebutuhan akan pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menuju pendekatan yang kolaboratif dan berbasis partisipasi masyarakat. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan dominasi perspektif negara dan pembuat kebijakan sebagai aktor utama, sementara peran masyarakat masih bersifat pasif sebagai objek kebijakan. Penelitian ini menawarkan suatu model kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses mitigasi banjir, dengan menjalin kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Model ini tidak hanya memperkuat aspek ketahanan sosial, tetapi juga mengintegrasikan teori-teori governance kolaboratif, serta pendekatan partisipatif yang telah terbukti relevan dalam konteks pengelolaan bencana berbasis lokal. Dalam konteks inilah, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan sistemik antara teori dan praktik, serta pada desain kebijakan mitigasi banjir yang bersifat adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.



Gambar 7. Visualisasi Analisis VOSviewer Artikel Banjir

Visualisasi dari 300 artikel diseluruh dunia dari tahun 2018-2025 yang mengkaji tentang kebijakan banjir dari sumber sumber seperti Scopus, Scimago, Elvesier, Wiley and Francis, Springer yang didapat dari Publish or Perish dengan analisis VOSviewer.



Gambar 8. Visualisasi Analisis VOSviewer Keberadaan Penelitian

Pada gambar jejaring diatas terlihat bahwa kajian banjir dan kebijakan bukan menjadi kajian yang signifikan dikaji secara bersamaan. Trend kajian yang muncul justru kajian banjir berbasis komunitas dimulai tahun 2022. kebaharuan penelitian ini menghubungkan sejumlah kajian yang sejauh ini belum berkaitan satu sama lain yakni kajian soal kebijakan banjir, mitigasi resiko dan kajian berbasis partisipasi masyarakat dalam bentuk komunitas. apabila dilihat pada gambar semua kajian tersebut tidak pernah dibahas secara bersamaan tapi dibahas masing masing, sementara riset ini membahas kesemua komponen tersebut sehingga menghasilkan sebuah kajian model kebijakan mitigasi resiko banjir berbasis partisipasi komunitas masyarakat selain itu pada gambar diatas terlihat bahwa belum ada kajian yang menggunakan pendekatan kolaboratif. Sedangkan penelitian ini selain

membahas kajian partisipasi masyarakat dalam kebijakan mitigasi resiko banjir juga menggunakan pendekatan kolaboratif didalam kajiannya.

Kebaharuan Penelitian (Novelty) lainnya dalam rancangan penelitian ini adalah Terciptanya Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang berdasarkan dari hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik melalui pendekatan teoritis yang komprehensif, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tantangan nyata di lapangan. Dalam konteks negara berkembang yang kerap menghadapi bencana banjir secara berulang, kebijakan yang bersifat kolaboratif dan berakar dari kebutuhan serta kapasitas lokal merupakan solusi strategis yang sangat relevan. Maka dari itu, model kebijakan yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam merancang strategi mitigasi risiko banjir yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

1.6. Batasan Penelitian

Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami permasalahan banjir setiap tahun. Kompleksnya penyebab permasalahan banjir ini membuat permasalahan banjir ini belum terselesaikan dengan baik. Banjir di kota Palembang disebabkan berbagai faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penelitian mengenai permasalahan banjir di Kota Palembang pun sudah banyak dilakukan. Beberapa aspek yang dapat menjadi bahan penelitian mengenai permasalahan banjir di Kota Palembang antara lain adalah pengukuran tinggi pasang surut, permasalahan kependudukan, peta rupa bumi dan rendahnya topografi Kota Palembang, penggunaan lahan, permasalahan genangan dan jaringan drainase Kota Palembang, analisis hidrologi, analisis hidrolik dan kapasitas saluran air, Tinggi pasang Sungai Musi ketika pasang sehingga terjadi aliran balik menuju hulu sungai, kebijakan yang tidak konsisten soal tata ruang, peningkatan jumlah penduduk sebesar setiap tahun yang mengakibatkan peningkatan luas area terbangun, pendangkalan sungai akibat dari perilaku masyarakat yang tinggal di pinggir sungai membuang sampah ke sungai, seperti minimnya kolaborasi serta aspek aspek lain dalam menangani permasalahan banjir. Dalam penelitian ini dibatasi pada aspek Kebijakan Publik dan aspek Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat.

1.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Model Kebijakan Publik Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Banjir di Kota Palembang sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait permasalahan banjir dapat mengurangi dampak banjir dikota Palembang.

2. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan dalam Kebijakan mitigasi resiko banjir di Kota Palembang
3. Kolaborasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kebijakan mitigasi resiko banjir di Kota Palembang
4. Diperlukan Kebijakan mitigasi resiko Banjir Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy. 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (*Action Research and Case Studies*). Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Abdul Wahab, Solihin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adiyoso, Wignyo. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrisal, Ade Ferry, 2022. *Collaborative Governance* Dalam Pembuatan Kebijakan, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 11, No 5, Desember 2022 pISSN 2089-7146 – eISSN 2615-5567.
- Agranoff R. and Mcguire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies For Local Governments*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Agung Manghayu, 2017. Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat, Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) : Vol.4, No.1 - Juni 2017
- Al Amin, M. B. 2016. Analisis Genangan Banjir di Kawasan Sekitar Kolam Retensi dan Rencana Pengendaliannya,Studi Kasus: Kolam Retensi Siti Khadijah Palembang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 27, 69-90.
- Al Amin,M. B. 2020. *Flood Hazard Mapping in Residential Area Using Hydrodynamic Model HEC-RAS 5.0*, Journal of Geomatics and Planning E-ISSN: 2355-6544 <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/geoplanning/> Vol 7, No 1.
- Alia, F., Al Amin, M. B., & Kurnia, A. Y. 2019. Evaluasi Aspek Teknis Prasarana Kolam Retensi untuk Pengendalian Banjir di Kecamatan Sukarame, Kalidoni, Kemuning dan Ilir Timur II Palembang. Seminar Nasional AVoER XI, Unsri, Palembang, 23 Oktober 2019.
- Alia, F., Rhaftalyani, & Ilmiaty, R. S. 2018. Perencanaan Kolam Retensi Untuk Pengendalian Banjir di RSMH Kota Palembang. Cantilever: Jurnal Penelitian dan Kajian Bidang Teknik Sipil, 7(1), 13-20.
- Alia, Febrinasti, Al Amin, M.Baitullah, 2019. *Evaluating the Technical Feasibility of Retention Basins for Flood Control in Palembang City*, Science and Technology Indonesia e-ISSN:2580-4391 p-ISSN:2580-4405 Vol. 4, No. 2, April.
- Alia, Febrinasti. 2020. Analisis Kapasitas Kolam Retensi Untuk Pengendalian Banjir Di Das Buah Kota Palembang, Cantilever Volume : 9 Nomor : 2 Oktober 2020, Hal. 97-107, ISSN: 1907-4247 (Print) ISSN: 2477-4863 (Online) Website: <http://cantilever.id.>,

Alwi, 2018. Kolaborasi Dan Kinerja Kebijakan: Tantangan dan Strategi dalam Penentuan dan Implementasi Kebijakan Kedai Buku Jenny

Andayani, Reni. 2021. Pengaruh Pasang Surut Terhadap Profil Muka Air Banjir Bantaran Sungai Musi Kota Palembang, Jurnal Cantilever Volume: 10 Nomor: 02 Oktober 2021 ISSN: 1907-4247 (Print) ISSN: 2477-4863 (Online) Website: <http://cantilever.id>.

Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago : Holt, Rinehart and Winston.

Andhika, Lesmana Rian. 2019. *Public Policy Modeling: Overview And Analysis For Government Policy Brief*, Jurnal Riset Pembangunan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.

Al-Hikam, 2020. "Prinsip Etika Lingkungan Hidup dalam Islam",www.alhikam.blogspot.com diakses tanggal 29 Desember 2023.

Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehartand Winston.

Ansell & Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory.

Asdak, C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Apriyanti, Kiki. 2008. Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik Menembus batas Rasionalisme, Inkrementalisme, dan Irasionalisme di Pemerintah Kabupaten Pati. Jurnal Ilmu Admininstrasi dan Kebijakan Publik. 5(2), pp. 194-210.

Apriadi , Heru Gunawan, Saggaf, Anis, Sarino.2021. *Study Of Flood Mitigation With Pumping System At Bendung River Palembang City*, Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Jurnal Sumber Daya Air Vol. 17 No.1, Mei 2021: 49 – 58.

Ardiansyah, Muhammad. 2023. *Mapping of Flood-Prone Areas using GIS & AHP Methods in the Lambidaro SubWatershed, Palembang City*, <http://dx.doi.org/10.22135/sje.2023.8.2.82-91>/ Sriwijaya Journal of Environment.

Ariska, Reza & Mardianto. 2023. Evaluasi kebijakan penanganan banjir di Kota Palembang. *undergraduate thesis*, Sriwijaya University

Arikunto, Suhaimi,2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsito. 2004. Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Demokratis.

- Astuti, Siswanto , Suprayogi. 2015. Analisis Kolam Retensi Sebagai Pengendalian Banjir Genangan di Kecamatan Payung Sekaki. Jurnal Teknik Sipil Universitas Riau. Pekanbaru.
- Azwar, Saifuddin. 2012. Reliabilitas dan Validitas Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 2010. “*Global Warning* dan Kesadaran Peduli Lingkungan”,dalam Arif Sumantri. Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.). Cet. Ke- 1.
- Bambang, Sugiono dan Ahmad, Husni. 2000. “Supremasi Hukum dan Demokrasi”,dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 14 Vol. 7, hlm. 79
- Bazeley, P., Jackson, K. (2013). Qualitative Data Analysis Nvivo. London: Sage Publications Ltd
- Beal. 1964. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta.
- Bingham, Lisa Blomgren. 2011. *Collaborative Governance. Dalam: Mark Bevir (ed). The SAGE Handbook of Governance*. New Delhi: SAGE Publication India Pvt Ltd, halaman 386-401.
- Bormann, N. C., & Golder, M. 2013. *Democratic Electoral Systems around the world*, 1946-2011. *Electoral Studies*, 32(2), 360–369. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.01.005>.
- Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi),Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Bupinder, Zutshi. 2020. *Community Participation and Preparedness for Integrating Disaster Risk Reduction (DRR) in Managing Disasters A Study of Srinagar Floods (2014)*, India Indian Council of Social Science Research, New Delhi, India European Scientific Journal June 2020 edition Vol.16, No.17 ISSN [URL: http://dx.doi.org/10.19044/esj.2020.v16n17p58](http://dx.doi.org/10.19044/esj.2020.v16n17p58)
- Brink, Ebba and Wamsler Crhistine. 2017. “*Collaborative Governance for Climate Change Adaptation Mapping citizen municipality interactions*”. *Journal Environmental Policy and Governance*, volume 28, issue 2.
- Bryson, John M; Barbara C. Crosby and M. M. Stone.2006. “*The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature.*” *Public administration review* 66(s1): 44-55.
- Bryson, John M; Kathryn S. Slotterback; Barbara C. Crosby. 2012. *Designing Public Participation Process*. *Public Administration Review*. Vol XX.
- Candra Rahmadiyanto Samekto. 2015. “*Collaboration dinamics in integrated water resources manajemen* (IWRM). School of Agriculture and Food Sciences, The University of Queensland.
- Carter, Nick. 1991. *Disaster management: A Disaster Manager’s Handbook*. ADB : Manila

- Cochran, W. G. 1977. *Sampling Techniques*. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons
- Cochran, Charles L. & Eloise F. Malone. 1995. *Public Policy: Perspectives and Choices*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Cook, Brian R. 2022. *Experiential learning, practices, and space for change: The institutional preconfiguration of community participation in flood risk reduction*, Faculty of Science, School of Geography, Earth and Atmospheric Science, The University of Melbourne, Carlton, Australia/ Journal of Flood Risk Management published by Chartered Institution of Water and Environmental Management and John Wiley & Sons Ltd DOI: 10.1111/jfr3.12861/.
- Considine, Mark. 1994. *Public Policy : A Critical Approach*. South Melbourne : Macmillan Education Australia Pty. Ltd.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daftar 20 Kota Rawan Banjir di Indonesia Viva. (2018, November). Diakses dari: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1090275-daftar-20-kota-rawan-banjir-di-indonesia>.
- Daniel Mazmanian , Shui -Yan Tang . 2009. *Collaborative Governance in the United States and Korea : Cases in Negotiated Policy Making and Service Delivery*. International Review of Public Administration 13, pp 1-11.
- Danusaputra, Munadjat. 2006. Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Bandung: Binacipta,
- Danim, Sudawan. 1997. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.,
- Davies A. L. & White R. M. 2012. *Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder ex The Synopsis of ADB Regional Seminar on Rural Development in Asia and the Pacific*, 15–23.
- Dedi Irwanto Muhammad Santun. 2009 “Produksi dan Reproduksi Simbolik: Memaknai Konstruksi Fisik dan Ideologis Kota Palembang dari Kolonial ke Pasca Kolonial, 1930-1960-an.” Tesis S-2. Program Studi Sejarah. Program Pascasarjana. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada,
- Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron. 2017. Kebijakan *Collaborative Governance* dalam penguatan kelembagaan program sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No. 1 Maret 2017 : 1 – 7.
- Detiknews. 2021. Fakta Mengagetkan dari Banjir Palembang yang Renggut Nyawa. Detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-5871782/fakta-mengejutkan-dari-banjir-palembang-yang-renggut-nyawa>

Dinata, Rian, Murakami, Keisuke. 2021. *Evaluation of Urban Flood Control Project (Case Study at Bendung Watershed in Palembang City, Indonesia)*, Departement Arsitektur dan Perencanaan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada Faculty of Engineering, University of Miyazaki, Japan, Jurnal Planoearth PWK FT UMMat | e-ISSN 2615-4226 Vol. VI No I Februari.

Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang. 2022. Peta Sebaran Banjir Kota Palembang. <https://bappedalitbang.palembang.go.id/peta-sebaran>

Djatmiko, Margono, Wahyono. 2000. Pendayaan Waste Management “Kajian Lingkungan Indonesia” PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djauhari Noor. 2014. Pengantar Mitiagasi Bencana Geologi, Yogyakarta: Depublish,

Djumiarti, Titik. 2018. *Collaborative Governance as A Management Innovation in Local Decentralization*. E3S Web of Conferences 73, 09012 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309012>

Dolbear, Kenneth M. (ed). 1975. *Public Policy Evaluation*. California: Sage Publication, Inc.

Donahue, John and Ricard J. Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Provate Roles For Public Goals in turbulent times*. New Jersey: Princeton University Press.

Dunn, William N. 1984. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dunn, W. N. 1981. *Public Policy Analysis : An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.

Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, Inc.

Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Effendi, H. 2003. “Telaah Kualitas Air Bagi Pengolahan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan”, Kanisius, Yogjakarta.

Eliane, Eldora. 2023. *Public Policy Analysis Models* JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia Vol 2. (1) April 2023 ISSN. 2829-4939.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, (June 2009), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.

Emerson, Kirk dan Nabatchi, Tina. 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press, Washington DC.

Emerson, Kirk. 2017. “*Collaborative Governance of Public Health in Low and Middle Income Countries : Lesson From Research in Public Administration*”. BMJ Global Health Journal, volume 3, issue 4.

Eriyatno. 2012. Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Surabaya: Guna Widya.

Erwandha, Reza. 2021. *Ex-Poste Study of Jakarta Flood Disasters from 2000 until 2019*, Journal of Global Environmental Science 2 (1) 2021: 13-18 Faculty of Mathematics and Natural Science Guangdong University of Technology, Guangzhou, China,

Etzioni, Amitai. 2010. “*Life : The Most Basic Right*”. Journal of Human Right, Vol 9, No.1.

Faille, P. De Roo de la. 1971. Dari Zaman Kesultanan Palembang (Penerjemah Soegarda Poerbakawatja). Jakarta: Bhratara.

Garvey, Alice. 2021. *Community action on natural flood management and the governance of a catchment-based approach in the UK*, Sustainability Research Institute (SRI), School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds, UK, Environmental Policy and Governance journal published by ERP Environment and John Wiley & Sons Ltd/ DOI: 10.1002/eet.1955.

Gaventa, Jhon & Valderama, Camilo. 2001. Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah, dalam pengantar buku, Mewujudkan Partisipasi; Teknik, Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21, *The British Council dan New Economics Fondation*.

Gerston, Larry N. 2002. *Public Policy Making in a Democratic Society*. Armonk: M.E. Sharpe.

Gibson, Ryan. 2014. “*Collaborative Governance in Rural Regions: An Examination of Ireland and Newfoundland and Labrador.*” Doctoral, Memorial University of New foundland. <http://research.library.mun.ca/6468/>.

Ghozali, Imam.2011, Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 21.0, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Ghozali, Imam.2005, Aplikasi Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Gosling, James J. 2004. *Understanding, Informing, and Appraising Public Policy*. New York: Pearson Longman.

Guy, Peter B, *American Public Policy*, Chatam House Publighser, New Jersey, 1984.

Grindle, M. S. & John W. Thomas. 1980. *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: John Hopkins University Press.

- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Guritno, Suryo., Sudaryono., Rahardja, Untung. 2011. *Theory and Application of IT Research Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. 2010. *Multivariate Data Analysis a Global Perspective* (7th ed.). Pearson Education.
- Hakim, Lukmanul. 2017. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 2 No. 2 November 2017. Karawang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Hanafiah, Djohan & A.W. Wijaya (Eds). 1996. Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan. Palembang: Pemda Dati II Sumatera Selatan.
- Hanafiah, Djohan (Ed). 1998. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Palembang: Pemkot Dati II Palembang.
- Henita Rahmayanti, 2020. Mitigasi Bencana Inobasi Model DIMFOL Dalam Pendidikan Lingkungan, Media Nusa Creative MNC Publishing : Malang, 58-59.
- Hill, M. (ed.) 1997. *The Policy Process : A Reader*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Hoirisky, C., Rahmadi, R., & Harahap, T. 2018,. Pengaruh Perubahan Pola Penggunaan Lahan Terhadap Banjir di DAS Buah Kota Palembang. In Seminar Nasional Hari Air Sedunia (Vol. 1, No. 1, pp. 14-25).
- Horisky, C., Rahmadi, & Harahap, T. 2018. Pengaruh Perubahan Pola Penggunaan Lahan Terhadap Banjir di DAS Buah Kota Palembang.Seminar Nasional Hari Air Dunia 2018, Unsri, Palembang, 20 Maret 2018.
- Hogwood, Brian W. & Lewis A.Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Horn, C. & Michael Hill. 1993. *The Policy Process in the Modern Capitalist State*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Howlett, M. & M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem*. New York: Oxford University Press
- Hudaya, dkk, 2021. *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 12, No.1, 2021 DOI: 10.20414/komunitas.v12i1.3355.

Hughes, S. W. & Kenneth J. Mijeski. 1984. *Politics and Public Policy in Latin America*. Colorado: Westview Press, Inc.

Ida Liana Tanjung. 2006. "Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatera Selatan, Abad ke-20". Tesis-S2. Program Studi Sejarah. Program Pascasarjana. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada.

Irawan, Denny. 2017. *Collaborative Governance* (Studi Deskripsi Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: (h.1-12).

Irianto, G. 2006. Pengelolaan sumberdaya lahan dan air : Strategi pendekatan dan pendayagunaannya (2006th ed.). Papas Sinar Sinanti.

Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI press.

Islamy, M.I. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 2004. "Membangun Masyarakat Partisipatif", dalam *Jurnal Administrasi Publik*, No. 2 Vol. IV Maret-Agustus. hlm. 3-9.

J.Kodoatie, Robert dan Sugiyanto. 2002. Banjir beberapa penyebab dan metode pengendaliannya. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Jenkins, Williams J. 1978. *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. London: Martin Robertson.

Jones, Charles. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy. Third Edition*. California: Wadsworth, Inc.

Kamil, Erfan M. 2023, *Urban Design Approach to Flood Problem in Palembang City*,Jurnal Tekstu Reka/ Tekstu Reka, Volume 1, Nomor 1, Agustus.

Keban, Y.T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.

Knobloch, Jenna. 2016. *We can work it out: Implementation and collaborative governance. Masters of Public Policy Oregon State University Springer*

Kodoatie, Raden& Sugiyanto. 2002. Banjir, Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Prespektif Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kodoatie, R. J. 2013. Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota.Yogyakarta: ANDI Offset.

Krishna, R. dan C. Lovell. 1985. *Rural and Development in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.

Expectations in deer management in Scotland. Journal of Environmental Management, 160-169.

Kurniawan, dkk. 2021, .*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang*. Jurnal Widya Iswara Indonesia, DOI: <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i1.69>.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Edisi Pertama, Gav

Lester, Lames V. & Joseph Stewart, Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth.

Lindblom, C.E. 1986. Proses Penetapan Kebijaksanaan. Terjemahan Ardian Syamsudin. Jakarta: Erlangga.

Marlina,Ayu. 2023. Analisis Saluran Drainase Akibat Genangan Di Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang, Jurnal Lateral, Vol. 1, No. 1.

Mazmanian, D.A., & Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company.

McGuire, M. 2006. *Collaborative public management: Assessing what we know and how we know it*. In *Public Administration Review* (Vol. 66, Issue SUPPL. 1, pp. 33–43). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00664>.

M.Daud, Silalahi. 2008. “Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia”, Alumni, Bandung.

Meng, Siyu. 2022. *Modelling and Simulation of Collaborative Innovation System in Colleges and Universities Based on Interpreted Structural Equation Model*, Applied Mathematics and Nonlinear Sciences Journal 7(1) (2022) 239–248.

M. Inoue. 2009. “*Prototype design guidelines for collaborative governance of natural resources*” The University of Tokyo, Japan./Institute for Global Environmental Strategies,Japan.

Morse, Ricardo S., and John B. Stephens. 2000. “*Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*.” Research Gate 18, no. 3 (January 1, 2012): 565–83.

Mubyarto.1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES : Jakarta.

Muin Famal, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press

Mukhtarov, Farhad, 2019, *Collaborative learning for policy innovations: sustainable urban drainage systems in Leicester, England*, Journal of Environmental Policy & Planning, DOI: 10.1080/1523908X.2019.1627864.

Mukhlis, Maulana, 2020, *Collaboration Model of Pesantren-Based Religious Deradicalization Policy*, Jurnal SMArt Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi Volume 06 No. 01 Juni 2020. WebsiteJournal:<http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>.DOI:<https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.905>.

Mulyadi, Mohammad. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Desa. Ciputat Tangerang Selatan; Nadi Pustaka

Mungkasa, Oswar. 2020. Tata Kelola Kolaboratif. Mengelola Kolaborasi Beragam Pemangku Kepentingan. Makalah lepas.Makalah dapat dijangkau melalui https://www.academia.edu/43431805/MAKALAH_Tata_Kelola_Kolaboratif_Collaborative_Governance_.Menata_Kolaborasi_Pemangku_Kepentingan

Muslimin, Amrah. 1986. Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan. Palembang: Pemda Sumatera Selatan.

Mustari Nuryanti, S. M. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: LeutikaPrio.

Mustopadidjaja, AR. 1992. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Penerbit LAN.

Nabukenya, J. 2005. *Collaborative Engineering for Policy Making: A Theory of Good Policy in Collaborative Action*. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.

Nasrulhaq, 2020. Nilai Dasar *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2020, Volume 6, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499 p-ISSN:2442-949X)

Ni Luh, Yulyana Dewi. 2019. Dinamika *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial e-ISSN: 2581-2424 Vol 3, No. 2, Agustus 2019 <https://journal.undiknas.ac.id>.

Nisumanti,S. 2023. *Analysis of drainage network capacity in Rawa Jaya Area, Ilir Timur I*, Palembang, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

Nugroho, Bambang. 2021. *Model Implementation of Flood Control Policies Based on Community Participation (Study of Policy Implementation in Flood Hazard Management in Purwantoro Village, Malang City)* Journal of Economics and Sustainable Development www.iiste.org ISSN 2 222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.12, No.12.

- Nugroho, R. 2018. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi.Jakarta: Media Komputindo..
- Nurhayati, Neni. 2023. *Systematic Literature Review: Tata Kelola Kolaboratif Dalam Sektor Publik*, Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11– Nomor 1, Mei 2023, (Hlm 1-22) DOI 10.34010/agregasi.v11i1.9207 Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>.
- O'Flynn, J., & Wanna, J. 2008. *Collaborative Governance : A new era of public policy in Australia?* In *Collaborative Governance : A new era of public policy in Australia?* https://doi.org/10.26530/oopen_458884.
- Oktarini Saputri, Nurul. 2019. Aplikasi Peta Titik Rawan Banjir Di Kota Palembang Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK) DOI: 10.25126/jtiik.201961417 Vol. 6, No. 4, Agustus 2019, hlm. 451-456.
- Omar Faruk, Md, 2022. *Impact of Farmers' Participation in Community-Based Organizations on Adoption of Flood Adaptation Strategies: A Case Study in a Char-Land Area of Sirajganj District Bangladesh*,Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture, Dhaka 1215, Bangladesh/Journal Sustainability, 14, 8959. <https://doi.org/10.3390/su14148959>.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press
- Otto, Soemarwoto. 2008. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Paimin, dkk. 2009. Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor. Balikpapan: Troenbos Internasional Indonesia Programe.
- Palumbo, D.J., & Marvin A. Harder (eds.). 1981. *Implementing Public Policy*. Toronto: Lexington Books.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2018 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Palembang No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pemanfaatan Rawa.

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032.

Pipin, Yunus. 2020, *Community Participation Relationship with Flood Disaster Mitigation in Bolioyohuto District, Gorontalo District*, Journal of Community Health Provision Vol. 1, Issue 1,

Profil Propinsi Republik Indonesia: Sumatera Selatan. 1995. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Poso,Bernadus. 2023. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menanggulangi Banjir di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu, Jurnal PANGEA: Wahana Informasi Pengembangan Profesi dan Ilmu Geografi Volume 5, Number 1, Juni 2023, pp. 29-40 P-ISSN: 2355-1674 E-ISSN: 2716-3121 Open Access: <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/pangea/index>.

Pütlz, H., & Treib, O. 2007. *Implementing Public Policy*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 89- 107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

Putri, A. S. 2020. Apa Itu Banjir? Definisi, Penyebab dan Dampak. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/060000269/apa-itu-banjir-definisi-penyebab-dan-dampak?page=al>

Purbani, Kamalia. 2017. *Collaborative Planning for City Development: A Perspective from A City Planner*. Scientific Review - Engeenering and Enviromental Sciences, 26 (1), 136-137.

Prasetyo, Eko. 2021. Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X).

Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2020. Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja, Aspirasi: Jurnal Masalah-

Masalah Sosial Volume 11, No. 1 Juni 2020 ISSN: 2086-6305 (print) ISSN: 2614-5863 (electronic) doi: 10.22212/aspirasi.v11i1.1590 link online: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index/>.

Quade, E.S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. New York.

Rahalsyah, Putra Joni, Saggaff, Anis, , 2023, *Study of the Palembang City Watershed Sub-Flood System's Management Priority Scale*, Program Doktor, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya/JCEBT, Vol 7 (No 1) Maret.

Rahayu, dkk. 2009. Banjir dan Upaya Penanggulangannya. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana (PMB-ITB).

Rahayu, H & dkk. 2009. Banjir dan Penanggulangannya. Jakarta. Promise Indonesia.

Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahardjo, P. Nugro,2019, *7 Causes Flooding In City Area Which Are Very Densely Populated/* Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT/ JAI Vol.7 No. 2.

Rahmadi. 2018. Banjir Palembang, Salah Siapa? Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/rahmadi80323/5c0f0437aeebe10b6c6a9728/banjir-palembang-salah-siapa?page=all>.

Ramahdani, A dan Ramdhani, M, A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. 11(1), pp. 1-12.

Ramdhani, M. A., Suryadi, K., & Susantosa, P. 2006. *Telematic Policy Analysis in Developing Countries:A Case Study in Garut District-indonesia*. Journal of Applied Sciences Research, 2(1), 58-66.

Rendana, Muhammad , Mohd Razi Idri, Wan 2023, *Flood risk and shelter suitability mapping using geospatial technique for sustainable urban flood management: a case study in Palembang city, South Sumatera, Indonesia*, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia; Department of Earth Sciences and Environment, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, Geology, Ecology, And Landscapes <https://doi.org/10.1080/24749508.2023.2205717>.

Reno, S. 2019. Banjir di Palembang: Walhi Kritik Soal Fungsi Rawa. Kumparan. <https://kumparan.com/urbanid/banjir-di-palembang-walhi-kritik-soal-fungsси-rawa>

Riadi, M. 2022. Banjir (Pengertian, Jenis, Penyebab dan Pengendalian). Antara Kantor Berita Indonesia.<https://www.antaranews.com/berita/2671605/mengulik-persoalan-banjir-palembang>

- Rohekan, A. B. 2018. Banjir Sering Melanda Palembang ternyata Sejak Dahulu Begini Keadaannya. Tribun Sumsel. <https://sumsel.tribunnews.com/2018/12/03/banjir-sering-melanda-palembang-ternyata-sejak-dahulu-begini-keadaannya?page=2>.
- Rohman, Ainur. 2009. Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi. Malang : Averroes Press.
- Rosyidie, A. 2013. Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan. *Journal of Regional and City Planning*, 24 (3), 241. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2013.24.3.1>.
- Said, Sugiharto Umar. 2018, *Participation of Community in Malang City from Preventing Flood Disaster* Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.80.
- Sanderson, SK,2000. Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial (Farid Wajidi dan S Menno Penerjemah). Jakarta:Rajawali Pers
- Sandy,A, 2021.*Community Empowerment Model to Flooding Risk Reduction in Palembang City (A Case Study of Gotong Royong Program)* IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 810.
- Sandy, Amiruddin. 2021. Model Konseptual Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Banjir Di Kota Palembang. Tahta Media Group.
- Sakinah, Rahmah. 2019, Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir(Studi Kasus Sungai Wih Gile di Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 5 Nomor 4 Agustus 2019 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/.
- Santun, D. I. M. 2011. Venesia dari Timur: Memaknai produksi dan reproduksi simbolik kota Palembang dari kolonial sampai pascakolonial. Ombak.
- Santoso, Singgih. 2011. *Structural Equation Modeling (SEM)* Konsep dan Aplikasi dengan Amos 18, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta: PT Gramedia.
- Sari, E. R. 2018. Cek Disini, 25 Titik Lokasi Rawan Banjir di Palembang. Tribun Sumsel.Com. <https://sumsel.tribunnews.com/2018/11/13/cek-disini-25-titik-lokasi-rawan-banjir-dipalembang?page=2>.
- Schmeer, Kammi. 1999. *Guidelines for Conducting a Stakeholder Analysis*. Bethesda, MD: Partnerships for Health Reform, Abt Associates Inc.

Seno, Adi. 2013. Karakterisasi Bencana Banjir Bandang di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*. 15 (1), April 2013, hlm. 42-51.

Setiadi, 2023. *The flood management policy in Bandung city: Challenges and potential strategies* Journal , Cogent Social Sciences 9: 2282434 <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2282434>.

Sevenhoven, J.I van. 1971. Lukisan tentang Ibukota Palembang (Penerjemah Sugarda Purbakawatja). Jakarta: Bhratara.

Shirvani, H. 1985. *The Urban Design Process* (U. of Michigan (ed.)). Van Nostrand Reinhold. Sörensen, J., Persson, A., Sternudd, C., Aspegren, H., Nilsson, J., Nordström, J., Jönsson, K., Mottaghi, M., Becker, P., Pilesjö, P., Larsson, R., Berndtsson, R., & Mobini, S. (2016). *Re-Thinking Urban Flood Management—Time for a Regime Shift*. *Water*, 8(8), 332. <https://doi.org/10.3390/w8080332>.

Situngkir, Fernando. 2020, *Spatial Model Of Wetland Use Change And Flood Occurrence In Residential Areas* Resilience Development Initiative, Bandung, Indonesia Ecodevelopment Journal Vol. 3 No. 2 (57-63) <https://jurnal.unpad.ac.id/ecodev>.

Shofiyah, Rohimatush. 2021, *Implementation Of Collaborative Governance In Environmental Sanitation Management Adiwiyata Policy*, Jurnal Politico Vol. 21 No.2 September 2021 Page: 142-160. ISSN: p: 829-6696; e: 2549-4716 Web jurnal online; jurnal.unmuhjember.ac.id.

Sholeh, Kabib. 2023, *The Historical Value Of The Toponym Of The Musi River Across Ulu I Palembang*, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Vol. 9 DOI: 10.36424/jpsb.v9i1.354 No. 1 Mei.

Slamet, Jalaludin. 2021, Pencegahan Mitigasi Bencana (Teori dan Praktik), Solok-Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim)

Smith, K, Petley, DN.2008, *Environmental Hazards Assessing risk and reducing disaster*, Keith Smith and David N. Petley Routledge, Taylor & Francis e-Library.

Soleh. 2022. Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Sungai Citarum Hulu, Jurnal Aspirasi Vol. 12 No.1 Februari, e-ISSN 2686-4967.

Soegianto, Agoes. 2012. "Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan", Airlangga University Press, Surabaya.

Sonny, A Keraf. 2010 , Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: PT Kompas MediaNusantara). Cet. Ke- 1.

Subarsono, A. G. 2011. Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugandi, Dede. 2007. Model Penanggulangan Banjir. Jurnal Geografi. 7 (1), hlm. 6.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., Wibowo, Eri. 2002. Statistika Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 for Windows, Bandung: Alfabeta.
- Sujiyati, Maryani, and N. A. 2016. Pembangunan Kota Palembang Dengan Konsep Tata Ruang Kota Hijau Pada Masa Hindia-Belanda. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 15(1), 1–34. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/44>.
- Sukmawati, Ade. 2023, *Identification of Floods in Palembang Area Using Fuzzy Logic Method of Mamdani and Sugeno*, JITE (Journal of Informatics and Telecommunication Engineering) Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jite> DOI : 10.31289/jite.v6i2.8146/ JITE, 6 (2) January 2023 ISSN 2549-6247 (Print) ISSN 2549-6255 (Online).
- Sukwika, Tatan. 2019, *Community Participation Providing Hydrological Environmental Services In River Flow Area* Jurnal SEOI – Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta Vol 1 edisi 1.
- Sularso H.S,dkk. 2021. Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Manado, Jurnal Spasial Vol. 8. No. 2, 2021 ISSN 2442-3262, 268-269
- Suprapto, J. 2000. Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Keenam, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Supriyanto, 2001. “Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864.” Tesis S-2. Jurusan Sejarah. Sekolah Pascasarjana. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada,.
- Suripin, 2003. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Suryawan, dalam Plumer. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- Syamsuddin, Haris. 2007. Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI,
- Tachjan. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (*Public Policy*). Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tang, Shui-Yan & Daniel A. Mazmanian. 2008. *An Agenda for the Study of Collaboration Governance*. Los Angeles: University of Southern California.

Tang, Shui-Yan & Daniel A. Mazmanian. 2010. *Understanding Collaborative Governance From the Structural Choice Politics, IAD, and Transaction Cost Perspectives*. Los Angeles: University of Southern California.

Tasruddin, Ramsiah. 2015. Proses Kolaborasi antar Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Jurnal UIN Alauddin Makassar, Vol. 2, No. 1, 48-59.

Thomson, A.M., Perry, J.L. 2006. *Collaboration Process: Inside the Black Box. Article on Collaborative Public Management*.

Theodorson, G.A.1969. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Thomas Y. Crowell.

Theresia, Aprilia. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005), h. 1

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1991. Perencanaan Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung,

Tresiana, N. 2017. Kebijakan Publik. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Triatmodjo, Bambang. 2008. Hidrologi Terapan. Yogyakarta: Beta Offset.

Twigg, John. 2004. *Disaster Risk Reduction Mitigation and Preparedness in Development and Emergency Planning*. London: Overseas Development Institute.

Twigg, John. 2015. *Disaster Risk Reduction New Edition* 2015. London:Overseas Development Institute

Ulibarri, Nicola. 2023, *Drivers and Dynamics of Collaborative Governance in Environmental Management*, Department of Urban Planning & Public Policy, University of California Irvine, Irvine, CA, USA, *Environmental Management Journal* 71:495–504
<https://doi.org/10.1007/s00267-022-01769-7>.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup.

Wahab, S.A. 1990. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S.A. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S. A. 2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Wanna, John. 2008. *Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers, and Outcomes*. Dalam: Janine O'Fynn and John Wanna (ed). *Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia*. Australia: ANU E Press, halaman 3-12.

Warassih, Esni. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Webster, Merriam. 1976. Webster's New Collegiate Dictionary. Massachusetts: Springfield Publisher.

Wibawa, S., Yuyun Purbokusumo & Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibawa, S,1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Jakarta: C.V. Intermedia.

Wibowo, Lukas R. 2017 *Public policy analysis on the development of a compensation institution model at Ciliwung Watershed* Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 20, No. 3, November 2017,353-366.

Widjanarko, 2006. Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.

Wigyono, Adiyoso. 2018. Manajemen Bencana: Pengantar Isu-Isu Strategis, Jakarta: Bumi Aksara,

Wijaya, T. 2018. Palembang Banjir, Tidak Mengejutkan. Apa yang Harus Diperbaiki? Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2018/11/16/palembang-banjir-tidak-mengejutkan-apa-yang-harus-diperbaiki>.

Wijaya, Tony. 2009. Analisis *Structural Equation Modeling* Menggunakan AMOS, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.

Wulandari, Fauzi. 2021 Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir di Gampong Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Pendidikan Geosfer , V(2), 22–31

Yamin, Dodon. 2020, *Household Vulnerability To Environmental Change: Examining Adaptive Capacity Of Households To Flood Risks In Palembang*, Resilience Development Initiative, Bandung, Indonesia Faculty Ecodevelopment Journal Vol.3 No.1 (14-20) <https://jurnal.unpad.ac.id/ecodev>.

Y Hamdani, R S Ilmiaty. 2020, *Mainstreaming adaptation strategy for flood risk due to climate change impact on Jakabaring, Palembang, Indonesia*, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 423.

Zakariah, Hendra Wirawan. 2018 *Community Participation in Flood Disaster Management in Sumbawa Regency (case study in Songkar Village)* ICENIS E3S Web of Conferences 73, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/2018730>.

Zulkifli, Arif. 2017. Partisipasi Masyarakat atau *Society Participation*. Diakses melalui <http://bangazul.com/partisipasi-masyarakat-atau-society-participation/> pada tanggal 21 Desember 2023